

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan temuan-temuan yang didapat dan pembahasan untuk menjawab dua rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya aksi terorisme di Prancis dan dampak aksi terorisme di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya di Prancis pada masa pemerintahan François Hollande (2012-2017).

#### **4.1 Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Aksi Terorisme di Prancis pada Masa Pemerintahan François Hollande (2012-2017)**

Terorisme bukanlah hal baru bagi Prancis, namun menjadi topik yang hangat diperbincangkan ketika serangkaian aksi teror berdarah terjadi di Prancis beberapa tahun terakhir. Kata teror pertama kali dikenal pada zaman Revolusi Prancis 1789. Pada zaman tersebut, terorisme merujuk kepada pemerintahan hasil revolusi Prancis yang menyalahgunakan kekuasaan serta kekuatan untuk melakukan kekerasan terhadap rakyat dan pihak oposisi sehingga menimbulkan kematian, pengasingan, dan penjara secara paksa dalam skala besar pada masa pemerintahan Robespierre.<sup>1</sup>

Terorisme diartikan sebagai istilah bagi suatu kekerasan atau intimidasi dengan kekerasan terhadap masyarakat sipil dengan suatu motif. Di era modern ini, dalam rentang waktu tahun 2012 sampai dengan 2017, aksi terorisme telah

terjadi berulang kali di Prancis. Aksi terorisme tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Penelitian ini akan membahas tiga faktor penyebab terjadinya aksi terorisme di Prancis, yaitu faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial-budaya.

#### **4.1.1 Faktor Politik**

Prancis adalah negara yang paling aktif dan mendukung perang melawan kelompok-kelompok radikal di sejumlah negara. Tentara Prancis telah tersebar di beberapa negara Afrika dan Timur Tengah sebagai bentuk kerjasama politik global dalam misi militer PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia.<sup>2</sup>

Selanjutnya, Donnelly (1983, hal. 311) mengemukakan bahwa intervensi adalah bentuk campur tangan diktatorial terhadap urusan dalam negeri suatu negara, yang mencakup penggunaan ancaman kekerasan atau pelemahan ekonomi secara substansial. Di samping aktifnya negara Prancis berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB, Prancis juga sering melakukan intervensi terhadap negara-negara bekas jajahannya yang ada di benua Afrika tanpa legitimasi PBB. Pada 11 Januari 2013, Prancis melakukan intervensi militer di Mali, Afrika, yang dikenal dengan “operasi *serval*”. Serval sendiri adalah sejenis kucing liar asli Afrika yang dipercaya sebagai nenek moyang dari singa dan cheetah.

Prancis melakukan intervensi untuk mendukung tentara Mali untuk merebut kembali Mali utara yang telah jatuh ke tangan kelompok-kelompok Islam

ekstremis bersejanta. Pada operasi tersebut, Prancis didukung oleh 3.500 tentara dan belasan pesawat tempur.<sup>3</sup> Jean-Yves Le Drian, Menteri Pertahanan Prancis pada sebuah konferensi pers menegaskan bahwa sebuah intervensi di Mali adalah hal penting untuk menjaga keamanan wilayah Prancis, Eropa, bahkan dunia dari kelompok Islam yang mengancam untuk mendirikan sebuah negara teroris yang berada dalam jangkauan Prancis.<sup>4</sup> Prancis khawatir akan berkembangnya sebuah kelompok Islam ekstremis di Mali yang akan menjadi ancaman teror dunia internasional.

Dua tahun sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 Maret 2011 pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy, Prancis juga pernah mengintervensi Libya bersama koalisi empat negara anggota NATO (*The North Atlantic Treaty Organization*), yaitu Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, Inggris. Setiap negara mempunyai nama operasinya masing-masing dalam operasi yang dilakukan di Libya. Prancis menamai operasi di Libya dengan kode “operasi *harmattan*” yang berarti angin panas kering yang bertiup di Sahara dari bulan November sampai Maret. Operasi yang dilakukan Prancis beserta koalisinya dalam misi kemanusiaan dimana telah banyak korban berjatuhan akibat melawan untuk melakukan revolusi dari pemerintahan diktator yang menjabat selama 41 tahun, yaitu Muammar Gaddafi.<sup>5</sup>

Selain dengan Mali dan Libya, Prancis juga melakukan hubungan diplomatik dengan Nigeria. Pada tanggal 1 Juli 2014, Presiden Prancis François Hollande menyatakan belasungkawa kepada Presiden Nigeria Goodluck Jonathan

akibat insiden ledakan bom di sebuah mal di Abuja pada tanggal 26 Juni 2014, yang diklaim oleh kelompok ekstremis Boko Haram.<sup>6</sup> Boko Haram adalah kelompok Islam radikal Nigeria yang merupakan sekutu dari ISIS.<sup>7</sup> Dalam pembicaraan dengan Presiden Nigeria Goodluck Jonathan, Presiden Prancis François Hollande membahas mengenai Boko Haram dan Prancis akan mendukung negara-negara di Afrika, seperti Nigeria, Kamerun, dan Chad dengan mengirimkan tentara Prancis untuk membasmi kelompok radikal tersebut.

Pada hari Jumat, tanggal 5 September 2014, diadakan Konferensi Tingkat Tinggi negara anggota NATO di Newport, Inggris. Dalam konferensi tersebut, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, serta Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel, mengundang para Menteri Pertahanan dari negara anggota NATO, yaitu Prancis, Inggris, Jerman, Polandia, Kanada, Australia, Turki, Denmark dan Italia, membahas pembentukan koalisi internasional untuk bertarung melawan ISIS di Irak dan Suriah. Tujuan dari pembentukan koalisi yang digagas oleh Amerika Serikat, bertujuan menunjukkan bahwa ISIS merupakan musuh bersama dan dengan terbentuknya koalisi internasional dapat mencegah organisasi radikal tersebut untuk meluaskan wilayah kekuasaannya. Para anggota NATO akan bekerja sama dalam dengan memberikan bantuan secara militer maupun finansial.<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya, koalisi internasional yang dibentuk Amerika Serikat untuk melawan ISIS, bertambah menjadi 33 negara: Albania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Estonia, Finlandia, Georgia,

Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Kosovo, Latvia, Lituania, Luksemburg, Makedonia, Moldova, Montenegro, Maroko, Baru Selandia, Portugal, Korea Selatan, Rumania, Serbia, Singapura, Slowakia, Slovenia, Somalia, Swedia, Taiwan dan Ukraina.<sup>9</sup> Koalisi internasional tersebut dikenal sebagai Koalisi anti-ISIS dan menyetujui sebuah strategi yang mencakup, dukungan operasi militer, peningkatan kapasitas, pelatihan, menghentikan perekrutan pejuang teroris asing, memotong akses pembiayaan dan pendanaan organisasi ISIS, mengatasi bantuan kemanusiaan dan krisis yang terkait, serta deradikalisasi.<sup>10</sup>

Pada tanggal 24 September 2014, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengeluarkan resolusi 2170 dengan suara bulat (15-0), yaitu berisi larangan terhadap setiap warga anggota PBB melakukan perjalanan ke Irak atau Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Negara internasional mendukung positif resolusi tersebut serta memastikan bahwa resolusi ini dilaksanakan dengan benar, karena tindakan tegas diperlukan untuk memberantas ISIS, terutama tindakan untuk mencegah radikalisis, memerangi pendanaan teroris, koordinasi antara semua dinas keamanan dan kontrol perbatasan yang lebih ketat.<sup>11</sup>

Sebagai anggota koalisi anti-ISIS, Prancis akhirnya melakukan serangan pertama. Serangan tersebut dilakukan pada tanggal 19 September 2014. Angkatan udara Prancis menggunakan jet *Rafale* melakukan serangan udara terhadap ISIS di kota Mosul. Presiden François Hollande menyetujui serangan tersebut dilakukan oleh Angkatan Udara tanpa mengerahkan Angkatan Darat dalam meminimalisir

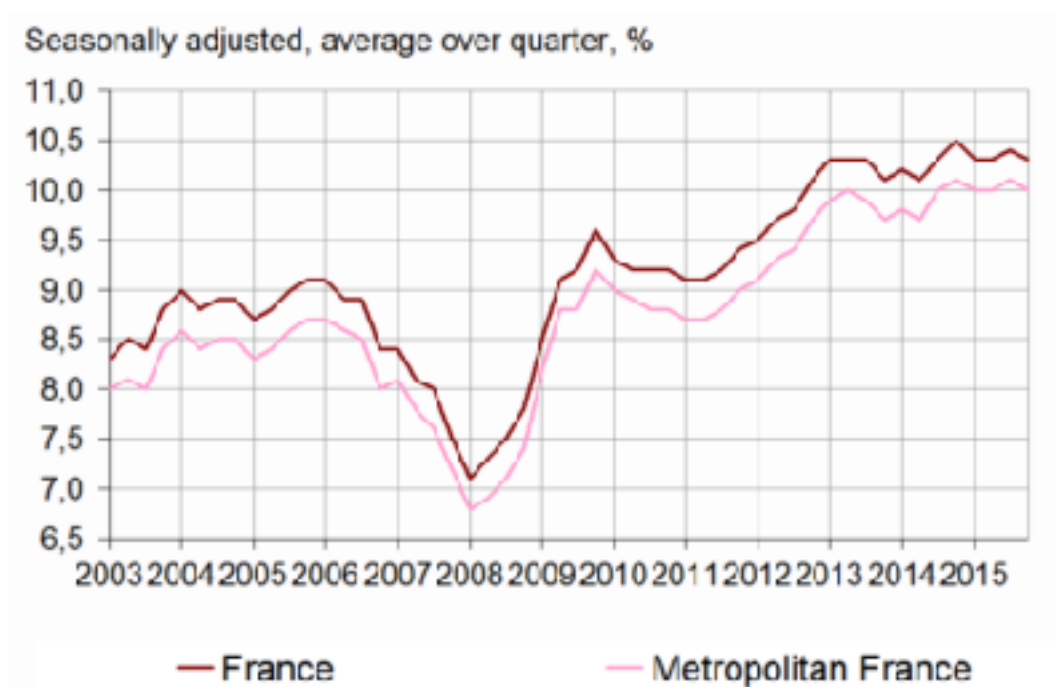
korban dari serangan melawan ISIS. Serangan yang dilakukan oleh Prancis juga sebagai tanda bahwa Prancis berkomitmen untuk melawan ISIS.<sup>12</sup>

Setelah dengan angkatan udara, Prancis kembali menyerang wilayah ISIS dengan mengirimkan kapal induk Charles de Gaulle. Pada tanggal 23 Februari 2015, Angkatan Laut Prancis dikerahkan dalam “operasi *chammal*”. Operasi *chammal* adalah nama operasi militer Prancis yang berlangsung di Irak dan Suriah dalam upaya mengempur ISIS. *Chammal* adalah sebuah angin barat laut yang bertiup di atas Irak dan negara-negara Teluk Persia adalah kode dari operasi Prancis yang berlangsung di Irak dan Suriah. Kapal induk Charles de Gaulle berisi 12 pesawat jet *Rafale*, pesawat pengintai dan helikopter yang akan menggandakan serangan Prancis terhadap ISIS.<sup>13</sup>

Kebijakan Presiden Francois Hollande untuk bergabung dengan koalisi anti-ISIS pimpinan Amerika Serikat serta serangan yang terus digempur oleh tentara Prancis di Afrika maupun Timur Tengah merupakan peringatan dan menunjukkan kekuatan militer terhadap organisasi-organisasi radikal di dunia. Upaya penangkalan terorisme yang sering digemborkan oleh Presiden Prancis Francois Hollande menjadi kontradiktif dengan apa yang Prancis lakukan, karena bukannya memperketat pertahanan dan keamanan dalam negeri dalam upaya mengatasi ancaman terorisme, Prancis justru melakukan serangan terhadap organisasi radikal di sejumlah negara. Rangkaian serangan yang Prancis lakukan akan memicu kemarahan berbagai organisasi radikal dunia dan Prancis akan menjadi target utama dalam serangan balasan.

#### 4.1.2 Faktor Ekonomi

Pada tahun ke dua pemerintahan François Hollande, Prancis mencatatkan angka pengangguran tertinggi sepanjang sejarah. Menurut *International Labour Organization* (ILO), angka pengangguran Prancis sentuh rekor tertinggi di angka 9,9%. Pengangguran di Prancis mencapai 3,49 juta jiwa pada bulan November 2014, selanjutnya bertambah 27.400 jiwa pada bulan Desember 2014 (Lihat gambar 4.1). Angka pengangguran pada bulan November 2014 naik 5,8% dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya. Angka tersebut menggambarkan hampir 1 dari 10 warga Prancis yang berada di usia produktif masih menganggur. Tingginya angka pengangguran tidak lepas dari perekonomian Prancis pada tahun 2015 yang diperkirakan hanya tumbuh 0,4%.<sup>14</sup>

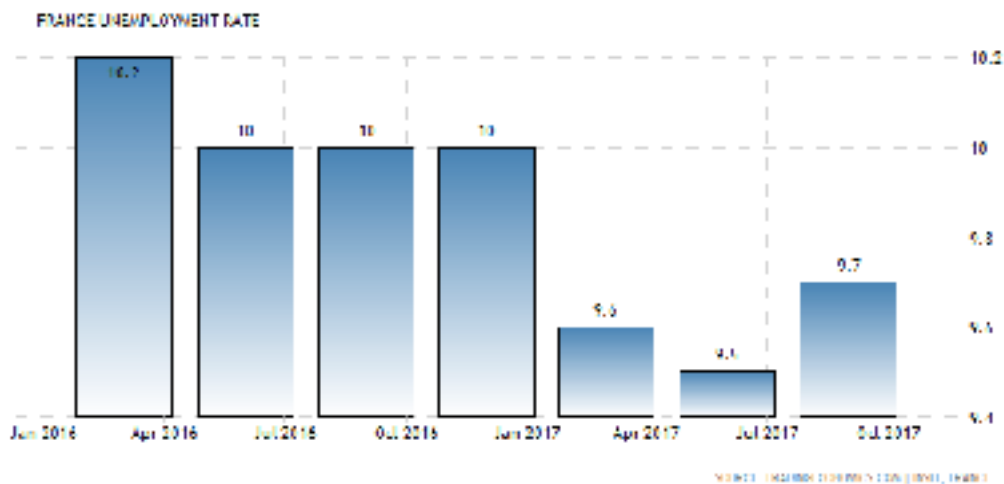


Gambar 4.1 Persentase Pengangguran dari tahun 2003 hingga tahun 2015

Emmanuel Macron, selaku Menteri Perekonomian, sudah menerapkan berbagai cara dengan menambah jumlah perusahaan yang boleh beroperasi pada hari Minggu dan mempermudah persyaratan bagi para pekerja. Kebijakan Macron tersebut adalah upaya dalam menciptakan lapangan kerja bagi ribuan pengangguran untuk memenuhi janji Presiden François Hollande dalam mengurangi angka pengangguran. Namun efektivitas kebijakan oleh Macron untuk mengurangi angka pengangguran masih diragukan oleh sejumlah pihak.<sup>15</sup>

Pada akhir masa jabatannya, Presiden François Hollande masih gagal dalam mengatasi masalah pengangguran di Prancis. Pada tahun 2017, angka pengangguran di Prancis masih tinggi dengan presentase 9,7% (Lihat gambar 4.2).<sup>16</sup> Dengan data tersebut, dapat diketahui bahwa selama lima tahun masa pemerintahan Presiden François Hollande perekonomian Prancis tidak mengalami kemajuan dalam menurunkan angka pengangguran yang masih terbilang tinggi.





**Gambar 4.2 Persentase Pengangguran dari tahun 2016 hingga tahun 2017**

Pengangguran sering menjadi masalah dalam perekonomian di beberapa negara, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya seperti kriminalitas yang bisa menjadi akar dari merebaknya tindak terorisme. Data tentang faktor ekonomi tersebut menjelaskan bahwa tingkat pengangguran yang masih tinggi dan kondisi kesejahteraan masyarakat yang buruk mendorong serta memicu sejumlah orang berpendidikan untuk menjadi otak dalam misi tindakan teroris. Kondisi masyarakat yang miskin dan berpendidikan rendah akan memudahkan organisasi teroris untuk merekrut anggota lainnya yang ditujukan terhadap masyarakat yang terbelakang secara ekonomi. Keterbelakangan ekonomi memudahkan organisasi jaringan pelaku teror untuk merekrut anggota teroris lainnya dengan mendoktrin paham radikalisme yang menuntun masyarakat ke arah pembebasan dari kemiskinan.

Kegagalan Presiden François Hollande dalam menciptakan kesejahteraan di bidang ekonomi dengan adanya kemiskinan dan besarnya jumlah pengangguran merupakan hal yang mendorong terjadinya serangkaian aksi terorisme di Prancis.

#### 4.1.3 Faktor Sosial-Budaya

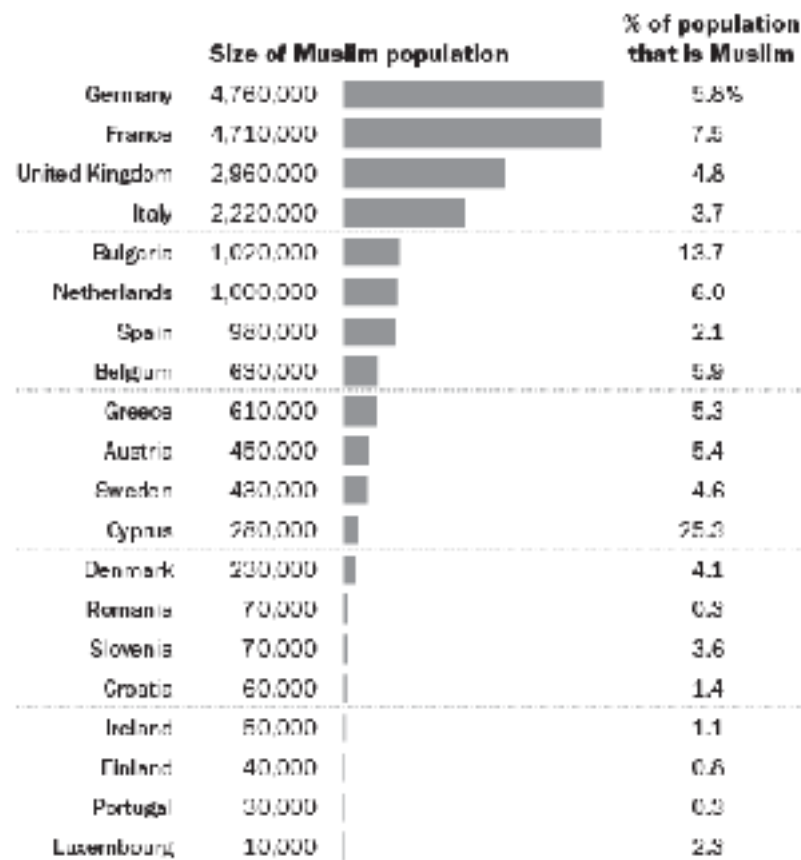
Tylor (1871, dikutip dari Ratna, 2005, hal. 5) mengemukakan bahwa budaya adalah suatu kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, serta kemampuan lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya adalah cara hidup yang dimiliki oleh sebuah kelompok masyarakat yang terbentuk dari berbagai unsur.

Prancis adalah negara yang menganut sekulerisme atau *laïcité*. Kebijakan ini memisahkan urusan kenegaraan dan agama, tetapi di sisi lain kebijakan ini mempersulit dan mencederai penganut agama tertentu dalam menjaga agamanya untuk memakai atribut khusus yang diperintah oleh agama maupun dalam mendata berbagai etnis dan agama yang dianut masyarakat Prancis. Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari masyarakat Prancis maupun masyarakat global.

Hukum *Laïcité* melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan seperti jilbab, serta kippa Yahudi dan salib di semua ruang publik. Bahkan, sekolah-sekolah di Prancis juga memegang teguh nilai-nilai sekuler yang memisahkan antara agama dan negara. Pada 3 Mei 2015, seorang guru di kota Charleveille-

Mezieres mengusir siswi Muslim di Prancis dari kelas karena jilbab dan rok panjang yang dipakai siswi tersebut kedalam kelas. Kepala dinas pendidikan daerah setempat, yaitu Patrice Dutot membenarkan peristiwa pengusiran terhadap siswi tersebut karena melanggar hukum Prancis yang melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan di ruang publik manapun.<sup>17</sup>

Menurut portal berita *Pew Forum Research*, pada tahun 2010 diperkirakan sekitar 7,5% dari total masyarakat Prancis beragama Islam serta memiliki populasi 4.7 juta jiwa. Hal tersebut menjadikan Prancis sebagai negara Eropa dengan populasi Muslim terbesar ke dua setelah Jerman yang memiliki populasi muslim 4.8 juta jiwa (Lihat gambar 4.3).<sup>18</sup>



Source: Pew-Templeton Global Religious Futures Project ([www.globalreligiousfutures.org](http://www.globalreligiousfutures.org)). Notes: All estimates for 2010. There were fewer than 10,000 Muslims in Slovakia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Estonia, the Czech Republic and Malta. Cyprus not shown on map.

PEW RESEARCH CENTER

**Gambar 4.3 Persentase Populasi Muslim di Eropa**

Menurut Theodorson & Theodorson (dikutip dari Fulthoni, 2009, hal.3) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorial, atau atribut- atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Dapat

disimpulkan bahwa, diskriminasi adalah suatu tindakan dari pihak mayoritas dominan terhadap minoritas yang lemah.

Sebagian besar umat Muslim Prancis adalah keturunan imigran Magribi asal Afrika Utara, seperti Aljazair, Tunisia dan Maroko. Sayangnya sebagian besar dari mereka hidup miskin dengan angka pengangguran para pemuda keturunan imigran Magribi ini mencapai 30%.<sup>19</sup> Sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Prosiding National Academy of Sciences*, mengemukakan bahwa seorang warga Kristen keturunan Afrika dua kali lebih mungkin dipanggil untuk wawancara kerja daripada seorang warga Muslim yang mempunyai kemampuan yang sama. Penelitian tersebut berfokus kepada agama, bukan ras maupun negara asal.<sup>20</sup> Hal tersebut menjadi jawaban atas diskriminasi kepada warga Muslim Magribi yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Prancis.

Kemiskinan dan pengangguran tidak lepas dari diskriminasi yang diperoleh warga keturunan Muslim Magribi saat mencari pekerjaan. Ketidakadilan perlakuan masyarakat Prancis asli terhadap imigran Magribi di segala bidang di Prancis, yaitu di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial-budaya menyebabkan adanya kesenjangan sosial, gejolak sosial maupun gesekan di masyarakat karena imigran muslim diperlakukan tidak adil oleh masyarakat Prancis asli maupun pemerintah yang menjadi sumber utama konflik ataupun pemicu terjadinya aksi terorisme.

Berdasarkan data-data tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa faktor politik, faktor ekonomi, maupun faktor sosial-budaya menjadi faktor yang saling

berhubungan serta terkait dalam terjadinya aksi terorisme di Prancis. Dalam penelitian ini terdapat faktor langsung dan tidak langsung dalam terjadinya aksi teror di Prancis. Faktor politik menjadi faktor langsung yang menyebabkan Prancis mendapatkan serangan teror balasan dari ISIS akibat kebijakan François Hollande ikut berpartisipasi dalam koalisi anti-ISIS pimpinan Amerika Serikat dan menyerang wilayah-wilayah yang dicurigai adanya jaringan teror. Sedangkan faktor ekonomi dan faktor sosial-budaya menjadi faktor tidak langsung yang hanya membuat konflik kecil di internal Prancis.

#### **4.2 Dampak Aksi Terorisme Terhadap Berbagai Bidang di Prancis**

Rangkaian serangan teror telah memaksa adanya perubahan terhadap bidang politik, bidang ekonomi dan bidang sosial-budaya di Prancis. Sejumlah kelompok ekstremis selalu ada dan tumbuh. Sebagai seorang presiden, François Hollande dipaksa tanggap dalam menjaga keamanan dan pertahana negaranya dari serangan-serangan teror ke depannya. Dalam subbab ini, peneliti akan memaparkan dampak yang ditimbulkan akibat serangan teror yang melanda Prancis, yaitu dampak di bidang politik, dampak di bidang ekonomi, serta dampak di bidang sosial-budaya.

##### **4.2.1 Dampak di Bidang Politik**

Menanggapi pasca serangan teror, Presiden François Hollande menetapkan keadaan darurat untuk seluruh wilayah Prancis. Tentara dan Polisi dikerahkan

untuk menjaga ketegangan di berbagai wilayah Prancis. Pertama kalinya, perbatasan negara ditutup sejak Perang Dunia II. *Plan multi-attentats* (global), *plan blanc* (*Île de France*), dan *plan rouge* (global) adalah tiga rencana darurat Prancis untuk masa-masa darurat negara, diaktifkan oleh pemerintah.<sup>21</sup>

Selain itu, pada tanggal 14 November 2015, penerbangan di bandara Charles de Gaulle dan bandara Orly Paris dibekukan sementara pasca serangan yang terjadi di Paris. Semua sekolah dan universitas negeri ditutup. Presiden François Hollande membatalkan kunjungannya ke KTT G-20 Antalya 2015 dan mengutus Menteri Luar Negeri Laurent Fabius dan Menteri Keuangan Michel Sapin untuk mewakili dirinya.<sup>22</sup>

Selanjutnya, François Hollande mengeluarkan kebijakan untuk mengawasi pergerakan dan komunikasi dalam perbatasannya dalam meningkatkan pengawasan dengan mengeluarkan Undang-undang *Surveillance* yaitu undang-undang yang memberikan kekuasaan yang lebih luas kepada pemerintah untuk memonitor komunikasi ponsel dan internet warga Prancis. Undang-undang tersebut telah disahkan oleh parlemen Prancis enam bulan sebelum “Paris Attacks” yaitu pada bulan Mei tahun 2015 dalam menanggapi serangan terhadap kantor redaksi majalah satir *Charlie Hebdo*. Undang-undang tersebut memungkinkan pemerintah untuk memonitor panggilan telepon dan *e-mail* dari orang yang diduga memiliki koneksi dengan terorisme tanpa otorisasi dari hakim.

Lebih jauh dari itu, undang-undang tersebut mengharuskan penyedia layanan internet untuk menginstal *black box* yang dirancang untuk

menganalisis *metadata* di laman *web* dalam membuat data untuk badan intelijen Prancis.

Dalam kasus luar biasa, undang-undang *Surveillance* memungkinkan pemerintah untuk menyebarkan *ISMI catchers* yaitu sistem pelacak semua komunikasi ponsel di daerah tertentu. Sistem ini dirancang untuk meniru menara telekomunikasi, tetapi sistem tersebut dapat mencegat dan merekam data komunikasi dari telepon dalam jangkauan serta dapat melacak gerakan orang yang membawa ponsel.

Selanjutnya, undang-undang *Surveillance* memungkinkan agen-agen pemerintah untuk masuk ke rumah tersangka teroris untuk tujuan menanamkan *microphone bugs*, kamera pengintai, dan menginstal *keyloggers* pada komputer mereka, yang dapat menangkap data pada setiap klik *keystroke* dan mouse.<sup>23</sup>

Undang-Undang pengawasan tersebut memiliki kekuatan super yang mampu untuk melakukan apapun yang pemerintah Prancis inginkan. Ditambah dengan adanya serangan teroris, pemerintahan Prancis akan semakin waspada dalam mencegah terjadinya kejadian yang sama serta tidak ada yang bisa menghalangi berlakunya Undang-Undang *Surveillance*.



#### **4.2.2 Dampak di Bidang Ekonomi**

Menurut Dewan Promosi Pariwisata, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai andil yang besar dalam pertumbuhan perekonomian di Prancis. Setelah rangkaian teror yang terjadi di Prancis, perekonomian Prancis mengalami penurunan. Sektor pariwisata merupakan sektor yang penting bagi perekonomian Prancis, terutama Paris. Sektor tersebut menyumbang dua juta lapangan pekerjaan dan tujuh persen aktivitas perekonomian. Prancis kedatangan 85 juta wisatawan pada 2015. Namun jumlah turis terus menurun seiring dengan adanya serangan teror di tahun 2015. Jumlah wisatawan Prancis turun 8 persen pada kuartal pertama 2016 dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Akibat penurunan ini, pendapatan negara sebesar 40 miliar euro terancam hilang. Dalam enam bulan pertama tahun 2016, pendapatan hotel di Paris turun 7,5%. Menurut Peter Praet anggota Dewan Eksekutif Bank Sentral Eropa. Aksi terorisme di Prancis hanya berdampak sementara terhadap perekonomian di Prancis maupun Eropa.<sup>24</sup>

Pendapatan Air France-KLM turun sebesar 50 juta euro (\$ 54 juta) sebagai dampak setelah serangan Paris Attack. Serangan tersebut juga mengaburkan prospek pemulihan ekonomi Prancis yang rapuh. Pariwisata adalah industri nomor satu di Paris: Ini menghasilkan pendapatan lebih dari 21 miliar euro dari hampir 46 juta pengunjung ke kota itu tahun lalu. Sekitar 500.000 pekerjaan di Paris dan lingkungan sekitarnya bergantung pada industri ini.

Menteri Perekonomian, Emmanuel Macron mengatakan bahwa hotel-hotel di Paris mengalami penurunan jumlah tamu 15% sampai 20% dalam seminggu setelah serangan tersebut, serta jumlah orang yang makan di restoran turun 10%. Jumlah wisatawan yang membatalkan perjalanan ke kota dalam sepekan menyusul serangan melonjak 21% dibanding minggu yang sama tahun lalu. Selain itu, pemesanan untuk merayakan natal di Paris mengalami penurunan 13%.<sup>25</sup>

Serangan teror berdampak besar terhadap bidang ekonomi di Prancis karena tujuan utama dari teror adalah membuat kecemasan maupun ketakutan, sehingga setelah kejadian teror mencekam yang terjadi di Prancis beberapa tahun lalu, membuat takut seluruh lapisan masyarakat dan berdampak besar terhadap penurunan perekonomian Prancis.

#### **4.2.3 Dampak di Bidang Sosial-Budaya**

Pasca aksi teror di Prancis yang diklaim dilakukan oleh ISIS yaitu organisasi Islam Radikal. Islamophobia muncul kembali di Prancis dan menyalahkan agama Islam atas segala serangan teror yang terjadi. Muslim menjadi musuh dan ancaman yang menakutkan bagi masyarakat dunia tidak hanya di Prancis. *The National Observatory of Islamophobia* melaporkan seminggu pasca “*Paris Attack*” telah terjadi 32 insiden anti-Muslim. Jumlah tersebut naik delapan kali lipat dari biasanya. Insiden-insiden yang terjadi seperti seorang pria yang menyerang seorang perempuan Muslim berjilbab di Marseille serta merobek pakaiannya dengan pisau lalu menyebutnya teroris pada tanggal 19

November 2015.<sup>26</sup> Selain itu, coretan-coretan grafiti anti-Muslim yang bertuliskan “kematian untuk Muslim”, gambar swastika atau logo Nazi juga memenuhi dinding-dinding bangunan di wilayah Prancis Utara mewarnai kebencian masyarakat Prancis terhadap umat Muslim.<sup>27</sup>

Pada tanggal 18 Desember 2015, dua orang penjaga bandara Charles de Gaulle, Paris, yang beragama Islam dipecat dengan alasan janggut panjang yang menimbulkan ketakutan di kalangan penumpang, karena janggut melambangkan agama Islam yang dicap sebagai agama teroris.<sup>28</sup>

Selanjutnya, seorang wali kota di Prancis didenda 2.000 euro (atau sekitar Rp 28 juta) atas tuduhan menyebarkan kebencian dengan menyatakan bahwa terlalu banyak siswa Muslim di sekolah-sekolah di kotanya. Robert Menard, wali kota Beziers, yang terletak di Prancis bagian tenggara, merupakan kader Partai Front Nasional Anti-Imigran. Pada tanggal 1 September 2016, bertepatan dengan hari pertama tahun ajaran baru di Prancis, ia menyampaikan pesan bahwa dirinya melihat "perubahan besar-besaran". Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan dugaan pengusuran populasi Kristen kulit putih Prancis oleh para pendatang asing.

Pada 5 September, Menard mengatakan di stasiun televisi *LCI*, bahwa 91% muridnya adalah Muslim dan menyebut mereka adalah masalah toleransi terkait mayoritasnya murid Muslim di sekolah pusat kotanya. Selain denda, pengadilan Paris juga mengganjar biaya sidang sebesar 1.000 euro (atau Rp14 juta) bagi kelompok rasis yang membawa kasus ini ke pengadilan. Denda itu lebih

tinggi dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yaitu senilai 1.800 euro (atau sekitar Rp26 juta). Menard, yang sangat keras mengecam persoalan imigrasi Prancis adalah seorang politikus independen yang didukung oleh partai ekstrem kanan Front Nasional (FN) yang dipimpin oleh Marine Le Pen.<sup>29</sup>

Rangkaian aksi teror yang mengatasnamakan agama Islam, berdampak tidak hanya terhadap korban yang meninggal tetapi juga turut menyumbang dampak sangat besar terhadap kehidupan imigran Magrib di Prancis. Stereotip agama pada pelaku terorisme tidak pernah lepas, Islam selalu disalahkan dalam pelbagai peristiwa teror di dunia. Diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat Prancis asli berdampak sangat serius terhadap kehidupan imigran Magribi yang tinggal maupun menetap di Prancis. Pemberitaan media mendoktrin sejumlah masyarakat dunia untuk membenci umat Islam atas aksi teror yang dilakukan di Prancis. Faktor budaya, khususnya agama di Prancis berpengaruh sangat besar dalam kehidupan sosial di Prancis. Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan bahwa terorisme berdampak sangat terhadap segala aspek kehidupan di Prancis.